

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

NO	KONTEN INFOREMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI AKIBAT JIKA INFORMASI DIBUKA	KONSEKUENSI AKIBAT JIKA INFORMASI DITUTUP
1.	Biodata Elektronik PNS (Database)	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf h. 2. UU No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok pokok Kepegawain	Tidak Terbatas	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data Pribadi di PNS yang bersifat rahasia
2.	Daftar Nilai DP-3 PNS	1. UU No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok pokok Kepegawain 2. PP No. 48 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS	1 Tahun	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia
3.	Dokumen/Arsip ASN yang berisikan :	1. UU No. 14 Tahun	Selama dasar	Penyalagunaan data	Data Pegawai terproteksi

	Daftar Keuangan dan pendapatan pegawai > Rekening dan Tabungan Pegawai	2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h , 2 UU No . 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	hukum tersebut masih diberlakukan	Pegawai /ASN dan mengungkap data pribadi ASN yang bersifat rahasia	
4.	Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf h.	Tidak terbatas	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data Pribadi di PNS yang bersifat rahasia
5.	Bandwith Managemen	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi ITE\$ (Pasal 30)	Tidak terbatas	Penyalagunaan kapasitas Bandwith diluar ketentuan	Menjaga/melindungi hak akses
6.	Identitas PNS yang mengajukan izin Perceraian perkawinan	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf h.	Tidak terbatas	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data Pribadi di PNS yang bersifat rahasia
7.	Data Usulan pengangkatan PNS dalam jabatan Struktural	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf i.	Sampai dengan pelantikan	Merugikan Proses penyusunan kebijakan atau menghambat kesuksesan	Menjaga Iklim kondusif dilingkungan kerja

				kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	
8.	HPS (Harga Perkiraan Sendiri)	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i, dan huruf j, 2. Keppres No. 60 Tahun 2003 beserta perubahan	Selama Proser Pengadaan Barang dan Jasa	Merugikan Proses Penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara System (informasi apabila menimbulkan penilaian tidak objektif)	Efisiensi Anggaran karena diperoleh penawaran yang wajar
9.	Lokasi Server	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ ITE\$ (Pasal 30-37)	Tidak terbatas	Tindak System pengerusakan pencurian data	Melindungi mengamankan perangkat serta data
10.	Internet Protokol IP Address Private	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik /ITE (Pasal 30)	Tidak terbatas	Penerobosan Penyalagunaan hak akses	Menjaga melindungi hak akses

11.	Kode akses elektronik dan User/password	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik /ITE (Pasal 1 angka 16)	Tidak terbatas	Penyalagunaan oleh pihak lain	Menjaga ke amanan 20 System 20 jaringan
13.	Sistem keamanan Elektronik	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i, dan j 2. UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 	Tidak terbatas	Penyalagunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan database
14	Sistem Managemen Database	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf j. 3. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 	Tidak terbatas	Penyalagunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan database

		Transaksi Elektronik /ITE			
18.	Database Perizinan meliputi Nama dan Alamat Pimpinan	1. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik /ITE pasal 26 dan pasal 32	Tidak terbatas	Membuka informasi pribadi	Melindungi dan mengamankan data pribadi yang bersifat rahasia
20.	Berita acara pemeriksaan	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, 2. UU No. 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana 17 huruf a. huruf h dan huruf i 3. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17	Sampai ada persetujuan tertulis dari penegak perda yang bersangkutan selama proses pemeriksaan sampai diketahui pemenangnya	Dapat menghambat proses penegakan hukum. - Dapat mengungkap rahasia pribadi penegak hukum Dapat	Memperlancar proses penegakan hukum dan penyusunan kebijakan(personal dapat bertugas tanpa adanya rasa takut apabila terjadi rasa ketidakpuasaan pelanggar perda) -Melindungi rahasia pribadi penegak hukum -Mempelancar proses penegakan hukum dan

		huruf l dan huruf j			<p>penyusunan kebijakan</p> <p>Melindungi data</p> <p>-data pribadi obyek diperiksa</p> <p>-Memperlancar proses penegakan hukum dan penyusunan kebijakan</p> <p>Melindungi data-data pribadi obyek diperiksa</p> <p>Melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan.</p>
21.	Data Perseorangan dan dokumen kependudukan	<p>1. Pasal 79 ayat 1, pasal 95A UU No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan</p> <p>2. Pasal 83 ayat 2 UU No.23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan</p>	Sampai dengan terbitnya izin dari Walikota	<p>1. Penyalahgunaan data kependudukan</p> <p>2. Mengungkapkan data pribadi penduduk yang semestinya terjaga kerahasiaannya</p>	<p>1. Terhindarnya penyalahgunaan data kependudukan</p> <p>2. 2. Terjaga kerahasiaannya data pribadi penduduk</p>

		3. Pasal 59 sd 64 Pemendagri No.25 tahun 2011 tentang pedoman pengkajian, pengembangan dan pengelolaan 34 system informasi			
22.	SPJ/alat bukti pertanggung jawabann keuangan akan tetapi yang dapat dibuka adalah laporan hasil pemrisakan BPK yang diserahkan ke legislatif	1.UU No.17 tahun 2003 tentang keuangan negara 2.UU No. 19 tahun 2012 tentang APBN Ta 2014 3. PP No. 70 tahun 2012 tentang standar biaya tahun 2013 UU No.43 tahun 2009 tentang kearsipan pasal 44 ayat (1) dan (2)	Selama masi berlaku	Dikhawatirkan adanya pemanfaatan/penyalahgun aan informasi oleh pihak tidak bertanggung jawab dan akan menimbulkan ketidakpastina Hukum	Menjaga informasi mengenai SPJ/alat bukti pertanggungjawabann keuangan pada kecamatan

24.	Laporan keuangan yang belum diferivikasi oleh Auditor	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 6 ayat 3 huruf e dan pasal 17 huruf c	Tidak terbatas, sampai ada keputusann yang lebih tinggi	Merugikan proses penyusunan kebijakan atau menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature, dapat menimbulkan keresahan masyarakat	Menjaga iklim kondusif dilingkungan sekolah, SKPD dan Pemerintah Kota
25.	Register SP2D ditutup akan tetapi dapat dibuka kalo yang meminta informasi kompeten dalam bidangnya	UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i	Tidak terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga kerahasiaan
26.	Surat Menyurat Elektronik	1.UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h 2.UU No.43 Tahun 2009 tentang kearsipan	Tidak terbatas	Merugikan proses menyusun kebijakan atau menghambatan kesuksesan kebijakan	Melindungin kerahasiaan dokumen
27.	Intrumen Penilaian Kinerja PNS/Pejabat	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 tahun huruf i	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam proses penilaian	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan

			kinerja		
28.	Data surat perintah penyegalan yang masih dalam proses (Bidang Pengendalian Tata Ruang Dan Bangunan)	UU No.14 Tahun 2018 pasal 17	Tidak terbatas	Dapat disalah gunakan oleh pihak pihak yang tidak bertanggung jawab	Dapat melindungi data pemerintah
29.	Dokumen hasil verifikasi SLF	UU no. 14 Tahun 2008 pasal 17	Tidak terbatas	Dapat disalah gunakan oleh pihak pihak yang tidak bertanggung jawab,terbukanya data aset seseorang/hak pribadi	Melindungi informasi data aset privasi pemohonan
30.	Arsip dinamis, aktif dan inaktif yang berisikan Dokumen keuangan : SPJ berikut lampirannya. Dokumen anggaran dan otoritasnya. Surat pencarian Anggaran: Dokumen Karya Intelektual oleh Lembaga/swasta/kelomppok/perseorangan; Data Informasi pertahanan dan	UU No. 14 Tahun 2008 KIP, Pasal 17; UU No. 43 Tahun 2009 tentang kearsipan pasal 44 ayat (1) dan (2)	1 tahun	Dapat membahayakan data arsip kantor	Melindungi data arsip kantor

	keamanan Negara; Data kekayaan alam yang dilindungi; Akta otentik yang bersifat pribadi dan wasiat; Memorandum/surat-surat penting yang perlu dirahasiakan				
31.	Identitas Pelapor dan isi laporan penyalahgunaan kewenangan	Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasi Informasi	Sampai dengan telah dinyatakan terbuka dalam persidangan yang dibuka untuk umum	Mengurangi partisipasi Masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Menjadikan Masyarakat partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan

32.	Spesifikasi Sarana Komunikasi Sandi	UU No.14 Tahun tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara
33.	Kunci Sistem Sandi	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf c angka 6	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara
34.	Perangkat khusus persandian	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara
35.	Penempatan jaringan, peralatan sandi dan tempat kegiatan sandi	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara
36.	Jalur komunikasi VVIP	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara

37.	Frekuensi Radio Komunikasi Persandian	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara
38.	Dokumen kontrak pengadaan barang/jasa	-Pasal 17b UU No. 14/2008 tentang UU KIP; -Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No.391/KPTS/M2011	Sampai dengan penyerahan kedua	Mengakibatkan timbul permasalahan yang bersumber dari pihak pihak yang tidak terkait	Melindungi para pihak yang terlibat kontrak
39.	Dokumen penawaran pengadaan barang/jasa	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf l dan huruf j;	Selama proses pengadaan barang dan jasa	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Dapat menjamin objektivitas penilaian/evaluasi penawaran
40.	Rincian Harga Penawaran dari calon penyedia barang/jasa	Pasal 17 huruf l dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang	5 Tahun	Perusahaan yang dijamin oleh Undang-Undang	Atas rahasia dagang bagi penyedia barang/jasa

41.	Dokumen Proses Penyelesaian Temuan Inspektorat/Badan	UU No. 14/2008 pasal 17 Huruf A	Sampai dikeluarkan surat bukti penyelesaian temuan	Bisa menimbulkan persepsi yang tidak terkontrol	OPD focus menyelesaikan temuan dengan baik
51.	Berita Acara Pemeriksaan terhadap PNS dalam kasus perceraian	UU NO.14/2008 Pasal 6 ayat 3 Huruf c	Sampai ada izin tertulis dari pihak berwenang	Mengungkap rahasia pribadi	Dapat melindungi rahasia pribadi
52.	Berita Acara Pemeriksaan terhadap PNS dalam Kasus Disiplin pegawai	UU no. 14/2008 Pasal 17 Huruf A dan H	Sampai diputuskannya kasus disiplin pegawai	Mengungkapkan rahasia pribadi	Dapat melindungi rahasia pribadi
54.	Riwayat dan kondisi anggota keluarga pegawai	UUD RI Tahun 1945 Pasal 28h UU no 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 HUruf H	Tidak terbatas	Mengungkapkan Data Pribadi pegawai melanggar HAM	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia
55.	Proses hukum pegawai yang bermasalah	UUD RI Tahun 1945 Pasal 28a s.d. 28h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 Huruf h	Tidak Terbatas sampai berkekuatan hukum tetap	Mengungkap Data pribadi pegawai melanggar HAM	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia

59.	Dokumen Perizinan	UU No.43 Th 2009 tentang Kearsipan	Selama masih berlaku	Terbukanya data aset seseorang/hak Pribadi	Melindungi informasi data aset privasi pemohon